



Aset Pemprov di Bali Hyatt Masih Jadi Benang Kusut

Denpasar (Bali Post) -

Masalah aset Pemprov Bali di Bali Hyatt, Sanur belum juga mendapatkan titik terang, kendati Pansus Aset di DPRD Bali sudah melihat adanya unsur pidana murni. Bila mengacu pada keterangan PT Wynnco Bali, aset tanah milik Pemprov yang dihapus menjadi saham itu rupanya telah dijual oleh PT Sanur Bali Resort Development Corporation. Namun penjualan saham oleh PT Sanur Bali Resort kepada PT Wynnco Bali itu tanpa sepengetahuan Pemprov Bali.

Ketua Pansus Aset DPRD Bali I Nyoman Adnyana mengatakan, ada unsur pidana murni dalam kasus tersebut. "Kalau unsur pidana murninya ada itu karena dia (PT Sanur Bali Resort) menjual tanpa sepengetahuan pemilik dan dia juga tidak jelas lembaganya ini. Kalau kita nanti ingin buktikan di pengadilan, bahwa dia (PT Wynnco) membeli dari Sanur Bali Resort, terus kita suruh hadirkan, kan.. juga enggak bisa akan hadirkan," ujar Adnyana usai memimpin rapat

Pansus dengan BPKAD Provinsi Bali, BPN Bali dan PT Wynnco di Gedung DPRD Bali, Selasa (13/6) kemarin.

Adnyana menambahkan, sejak tahun 1971 hingga sekarang tidak ada deviden atau kontribusi apa pun yang diterima Pemprov Bali. Padahal sarana akomodasi pariwisata dibangun menggunakan tanah DN 71 dan DN 72. Tanah DN 71 diproses menjadi HPL Pemprov Bali, sedangkan DN 72 menjadi hak pakai sesuai SK Mendagri.

"Memang kalau data, fakta dan bukti-bukti yang kuat dari Pemprov Bali tidak ada. Misalnya tentang sertifikat, tapi kan ini tanahnya ada, ada pengakuan, ada sejarahnya. Mereka sendiri mengakui kan DN 71 dan 72, itu salah satu bukti juga membenarkan," terangnya.

Dari pembahasan dewan sebelumnya, pembangunan akomodasi (Bali Hyatt) melibatkan PT Wynnco dengan kepemilikan saham 90 persen, PT Sanur Bali Resort dengan saham lima persen dan PT Fesia Raya dengan saham lima persen. Aset Pemprov Bali digabung pada PT Sanur Bali Resort. Selanjutnya ada surat Gubernur tahun 1972 yang melakukan pelepasan tanah untuk dijadikan modal. Lantaran bergabung dengan PT Sanur Bali Resort, saham Pemprov bernilai 10,9 persen dari lima persen saham perusahaan

tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama berharap Pansus Aset yang baru dibentuk ini tidak lagi "ompong" dengan tetap membiarkan benang kusut pada masalah aset Pemprov di Bali Hyatt. Bila perlu, Pansus menghadirkan tim ahli dan mengundang pula aparat penegak hukum. "Dulu, Hyatt ini milik pemerintah. Tapi pemerintah selalu kalah dengan swasta. Kenapa kalah? Pasti ada benang kusutnya, harus dicari satu per satu. Bila perlu, undang kepolisian, kejaksaan dan kalau perlu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi - red)," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengakui bila Pemprov selama ini kebingungan menelusuri aset di Bali Hyatt. Pihaknya sepakat masalah aset yang menjadi sa-

ham ini ditelusuri mengapa sampai hilang. Kendati saham yang dimiliki Pemprov tidak banyak atau hanya sepuluh persen dari lima persen saham PT Sanur Bali Resort. "Kan itu masalahnya, ya... sedikit banget. Begitu ada penambahan saham, penambahan modal ini kan delusi. Delusi ini semakin lama semakin kecil karena dia bukan penyertaan saham tetap," ujarnya.

Pastika menambahkan, pada saat melakukan perjanjian mestinya dibuat penyertaan saham tetap. Dengan demikian saham masih bisa dipertahankan. Kalau ada perpindahan atau jual beli saham, saham Pemprov tidak akan hilang. (kmb32)



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391

Edisi : Rabu, 14 Juni 2017

Hal : 2